

Social Culture Change sebagai Eksternalitas Transformasi Digital di Indonesia

Rena Febrita Sarie¹, Dwi Lesno Panglipursari², Allen Pranata Putra^{3*}

^{1,2,3}Universitas Wijaya Putra

renafebritasarie@uwp.ac.id, dwilesno@uwp.ac.id, allenpranata@uwp.ac.id

ABSTRACT

Changes in social culture on digital transformation in Indonesia have both positive and negative implications. This article presents a new anti-thesis in digital economy thinking, namely changes in people's behavior. The purpose of this study is to determine the socio-cultural changes of society in the digital transformation of economy, the externalities of the digital economy, and the adverse impact of the slow legality of legislation. This research is a qualitative descriptive that uses indepth interviews from several key informants, so as to obtain valid data saturation based on the interviews that have been conducted. The analysis of this study used data triangulation, namely documents, interviews, and observations. The results show that the digital transformation of the economy will always be influenced by externalities, and these externalities can be negative or positive. The stigma of society in this case becomes important to be able to avoid the negative impact of transformation. Often transformation is not accompanied by clear legality of legislation, so legality in Indonesia seems slow to adapt to social and economic changes. Legality is based on events, but when an event has grown and harmed many societies, then the legality is formed. There will always be a fee to be paid to exchange the slow legality of the legislation.

Keywords: Digital Economy, Externalities, Social Culture

ABSTRAK

Perubahan budaya sosial pada transformasi digital di Indonesia memiliki implikasi positif dan negatif. Artikel ini menyajikan suatu anti-thesis baru dalam pemikiran digital economy yaitu perubahan perilaku masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sosial budaya masyarakat pada transformasi digital economy, eksternalitas dari digital economy, dan dampak buruk dari lambatnya legalitas perundangan. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang menggunakan *indepth interview* dari beberapa informan kunci, sehingga mendapatkan kejenuhan data yang valid berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Analisa penelitian ini menggunakan triangulasi data yaitu dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil menunjukkan transformasi digital ekonomi akan selalu dihindangi oleh eksternalitas, dan eksternalitas tersebut dapat bersifat negatif maupun positif. Stigma masyarakat dalam hal ini menjadi penting untuk dapat menghindari dampak negatif dari transformasi. Seringkali transformasi tidak dibarengi dengan legalitas perundangan yang jelas, sehingga legalitas di Indonesia terkesan lambat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial maupun ekonomi. Legalitas didasarkan pada peristiwa, akan tetapi ketika sebuah peristiwa sudah membesar dan merugikan banyak masyarakat barulah legalitas tersebut dibentuk. Akan selalu ada biaya yang harus dibayarkan untuk menukar lambatnya legalitas perundangan dibentuk.

Kata Kunci : Digital Economy, Eksternalitas, Social Culture

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan budaya terjadi di hampir seluruh penjuru dunia, tidak satupun negara yang tidak pernah mengalami perubahan sosial dan budaya. Meskipun tidak secara menyeluruh perubahan sosial dan

budaya yang terjadi, akan tetapi perubahan tersebut merupakan salah satu tahap eksternalitas akibat adanya suatu perubahan variable lainnya. Dapat dikatakan bahwa, ketika variable baru tersebut merubah pola struktur sosial dan budaya masyarakat maka

perubahan tersebut juga dapat berlaku pada lapisan masyarakat di tempat yang berbeda (Yoo & Yi, 2022).

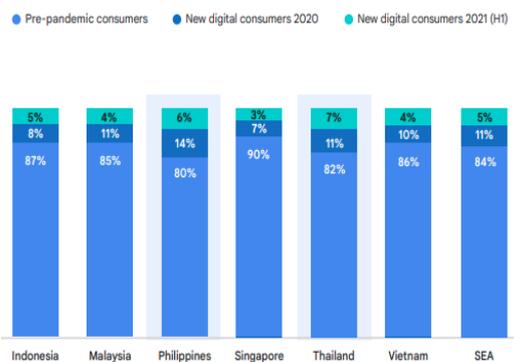
Perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan yang bersifat materiil maupun immaterial dengan menekankan pengaruh dari unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur immaterial. Kondisi masyarakat yang tertinggal secara sosial dan budaya akan menyebabkan masyarakat tersebut lebih mudah dan cepat dalam melakukan sebuah transformasi (Siregar & Zulkarnain, 2022). Kontradiksi argumentasi ini adalah bahwa mempertahankan kultur budaya setempat adalah yang paling penting, terlepas dari perubahan sosial dan budaya yang masih akan terjadi. Dukungan terhadap perubahan sosial dan budaya di masyarakat akan sangat cepat dan mudah ketika perubahan sosial dan budaya dapat diterima oleh masyarakat dan tidak mengganggu kultur sosial dan budaya sebelumnya.

Problem empiris perubahan sosial budaya di Indonesia dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah efisiensi sumber daya dan alokasi yang lebih cepat, sementara dampak negatifnya adalah kecanduan terhadap perubahan tersebut sehingga seseorang menjadi abai terhadap kegiatan yang lainnya. Dalam penelitian ini akan membahas perubahan eksternalitas dari masyarakat yang ditimbulkan dari transformasi digital. Analisa awal peneliti bahwa transformasi digital merubah pola ekonomi masyarakat dan secara kultur sosial sekaligus budaya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Mengacu pada literatur klasik bahwa sebuah perubahan yang dilakukan ketika dapat diterima oleh kultur sosial dan budaya sebelumnya maka perubahan tersebut akan berlangsung cepat dan massif (Tello-Gamarra & Netto, 2022).

Perubahan sosial dan budaya

masyarakat Indonesia tidak terlepas dari sebuah konsep eksternalitas (Wirya & Dwijendra, 2021). Eksternalitas merupakan aktivitas suatu kesatuan yang memengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lainnya dan terjadi diluar mekanisme pasar. Konsep eksternalitas ini sekaligus akan digunakan sebagai sebuah landasan teori untuk dapat memaknai bagaimana fenomena transformasi digital terjadi di Indonesia. Konsekuensi logis dari perubahan sosial dan budaya adalah memperhitungkan eksternalitas yang turut serta dalam perubahan sosial dan budaya tersebut (Dagnino, 2018). Eksternalitas ini tidak dapat secara spesifik dihitung melalui perhitungan deterministik matematis, tetapi melalui pendekatan *indept interview* yang sekaligus menjadi metode dalam penelitian ini.

Selanjutnya akan dijelaskan data empiris tentang transformasi digital di beberapa negara di Asia untuk dapat menunjukkan perubahan tersebut akan disajikan melalui Gambar 1 sebagai berikut:



Sumber: (E-Conomy, 2020)

Gambar 1. Digital Consumer ASEAN

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa posisi Indonesia berada pada posisi kedua consumer digital pada tahun 2021. Hal ini mengisyaratkan bahwa penggunaan internet di Indonesia cukup memengaruhi sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis letak perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga dapat diinterpretasikan dengan lebih detail dan komprehensif terkait dengan transformasi digital di Indonesia.

Variabel utama dalam membentuk suatu eksternalitas dalam penelitian ini adalah transformasi digital. Transformasi digital merupakan pemanfaatan teknologi digital yang tersedia seperti: teknologi virtual, *mobile computing*, *cloud computing*, integrasi semua sistem digital (Ulas, 2019). Transformasi digital merupakan proses perubahan yang eksplosif dan melibatkan sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dari sebelumnya. Sebuah transformasi digital akan menyebabkan seorang individu mengalami pengalaman yang baik dalam menerapkan transformasi digital tersebut. Secara kontinu jika seseorang merasa nyaman dan tingkat efektifitasnya tinggi maka dia akan memberikan rekomendasi kepada individu lain untuk menggunakan perangkat digital yang sama (Saputra et al., 2020). Hal ini menimbulkan eksternalitas yang kita bahas sebelumnya sekaligus efek domino dari adanya transformasi digital (Tomczyk, 2021).

Penggunaan perangkat eksternalitas untuk dapat memaknai transformasi digital akan menuntun kita pada perdebatan bahwa apakah transformasi tersebut menghasilkan eksternalitas positif atau eksternalitas negatif. Dalam penelitian ini akan berfokus pada salah satu dampak eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh sebuah transformasi digital. Bentuk dari eksternalitas negatif tersebut mengacu pada perdebatan tentang *cyber security*, yang banyak dibicarakan tentang keamanan cyber hampir di seluruh dunia selayaknya tulisan (Zwilling et al., 2022).

Konflik cyber sangat menderita karena kurang kejelasan dan pemahaman konseptual

diantara aktor-aktor yang terlibat utama tentang bagaimana menafsirkan terjadinya suatu *cybercrime*. Para peneliti telah mempertentangkan dan memperhitungkan potensi dan efek dari sebuah teknologi digital terhadap sosial dan budaya masyarakat. Perhitungan kekhususan konfrontasi cyber juga berusaha menjelaskan kesenjangan antara harapan dan perilaku, baik dalam hal atribusi (Buchanan, 2016), pencegahan (Fischerkeller & Harknett, 2017; Libicki, 2009; Nye Jr, 2016), dinamika eskalasi (Lin, 2012; Valeriano et al., 2018), paksaan (Borghard & Lonergan, 2017; Garfinkel & Dafoe, 2019; Gartzke & Lindsay, 2016), dan karakter konflik yang dominan ofensif di dunia maya (Gartzke & Lindsay, 2016). Secara khusus *cybercrime* bersifat multitafsir ketika pemegang kebijakan publik tidak mampu menginterpretasikan fenomena dengan baik.

Berdasarkan legalitas perundangan *cybercrime* dapat dibagi berdasarkan motif dan aktivitasnya, yaitu: a) *cybercrime* sebagai tindakan kejahatan murni; b) *cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu; c) *cybercrime* yang menyerang hak cipta; d) *cybercrime* yang menyerang pemerintah; e) *cybercrime* yang menyerang individu. Dalam penelitian ini secara khusus akan membahas beberapa temuan awal peneliti untuk menganalisis bagaimana legalitas perundangan di Indonesia berdasarkan *empirical problem* yang akan diteliti. Salah satu *empirical problem* pada penelitian ini adalah penggunaan voucher dua puluh ribu rupiah pada pengguna pertama aplikasi pemesanan makanan online.

Lebih lanjut penelitian ini berfokus pada bidang pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang terjadi di masyarakat. Secara harfiah penelitian ini juga akan memberikan sentuhan perdebatan legalitas perundangan

Penelitian ini akan berupaya dipublikasikan pada jurnal internasional yang terindeks Scopus.

Teori Perubahan Budaya Sosial

Perubahan sosial merupakan salah satu bentuk transformasi yang normal terjadi di dalam masyarakat sejauh perubahan tersebut tidak mengarah pada eksternalitas negatif. Perubahan tersebut secara kontinu memengaruhi pola interaksi sosial yang bersifat membangun karakter baru individu menuju proses yang lebih baik (Cahyono, 2016).

Beberapa karakteristik perubahan sosial di dalam masyarakat yaitu: a) pengaruh unsur kebudayaan material terhadap unsur immaterial; b) perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat; c) perubahan dalam hubungan sosial sebagai perubahan keseimbangan sosial; d) suatu perubahan yang diterima dikarenakan perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, ideologi, jumlah penduduk atau penemuan baru dalam masyarakat; e) perubahan pola kehidupan masyarakat; f) perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi nilai, sistem sosial, pola dan perilaku di antara kelompok masyarakat.

Penggunaan teori perubahan sosial adalah sebagai landasan teori dalam menganalisis fenomena transformasi digital yang terjadi di Indonesia, porsi teori ini menjadi sangat penting karena urgensi penelitian yang berimplikasi pada teori tersebut. Setidaknya melalui perangkat teori ini dapat menjelaskan fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentang transformasi digital.

Teori Eksternalitas

Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat dari sebuah transaksi yang merefleksikan harga terhadap barang tersebut. Terdapat dua bentuk eksternalitas yang terjadi di masyarakat yaitu eksternalitas positif dan

eksternalitas negatif. Pada penelitian berfokus pada eksternalitas negatif dari individu sebagai bentuk transformasi digital yang terjadi. Model eksternalitas negatif membentuk komponen dari kegagalan pasar sehingga menghasilkan kerugian surplus sosial dalam market equilibrium, dan kerugian ini memerlukan kebijakan korektif dari biaya hingga proses distribusi (Duke & Sassoon, 2017).

Secara eksplisit eksternalitas memiliki ciri-ciri yaitu; 1) eksternalitas dapat diproduksi oleh konsumen maupun produsen; 2) eksternalitas yang terjadi diluar mekanisme pasar; 3) terdapat feedback dalam aspek eksternalitas; 4) eksternalitas dapat bersifat positif maupun negatif; 5) peristiwa yang terjadi tidak ada hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain (bersifat independent); 6) peristiwa yang terjadi secara kelembagaan maupun individu.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasi dampak dari eksternalitas ini. Upaya pemegang kebijakan antara lain adalah menginternalisasikan eksternalitas sehingga pihak ketiga mendapatkan manfaat dari perilaku ekonomi yang lain. Intervensi pemerintah dalam hal ini dapat memberikan pilihan private bagi produsen maupun konsumen dalam mencapai efisiensi

Teori eksternalitas ini digunakan sebagai landasan teori kedua setelah teori perubahan sosial yang berfungsi untuk mengamati fenomena eksternalitas dari transformasi digital yang massif terjadi di Indonesia. Kerangka teori ini menjadi pisau analisa yang tajam dalam memaknai transformasi digital. Selanjutnya akan diuraikan teori digital economy yang juga menjadi salah satu grand theory yang digunakan dalam penelitian ini.

Teori Digital Economy

Paradigma digital economy memberikan perspektif baru dalam

perekonomian yang terjadi di seluruh dunia. Keterbukaan informasi yang ada di digital economy menjadikan permintaan pelanggan yang tersedia semakin kompleks dan rigid. Penggunaan alat digital yang lebih kompleks berpotensi untuk menyesuaikan jenis permintaan konsumen yang beragam baik dalam bidang transportasi, perhotelan, ritel dan lain-lain. (Doughty, 2014) menjelaskan setidaknya terdapat dua belas karakteristik teori digital economy yaitu: 1) Pengetahuan; 2) Digitalisasi; 3) Virtualisasi; 4) Molecularization; 5) Integrasi; 6) Disintermediasi; 7) Konvergensi; 8) Inovasi; 9) Prosumsi; 10) Kedekatan; 11) Globalisasi; 12) Ketidasesuaian.

Berdasarkan argumentasi tersebut digital economy yang terjadi merupakan transformasi struktur ekonomi yang ada di masyarakat. Problem transformasi digital merupakan problem laten yang massif dibicarakan di hampir seluruh dunia dan dibahas mendetail untuk dapat memberikan solusi alternatif kebijakan dalam memaknai fenomena tersebut. Selanjutnya digital economy memiliki lima tingkatan perubahan yang mendasar, yaitu: 1) individu yang efektif; 2) tim berkinejra tinggi; 3) perusahaan terintegrasi; 4) perusahaan yang diperluas; 5) bisnis dalam platform internet. Digital economy selain sebagai transformasi digital juga merupakan titik balik kekuatan bisnis global. Teknologi dalam digital economy mengurangi biaya promosi, biaya publikasi, biaya efisiensi produk, biaya branding product, dan biaya lainnya. Perhitungan matematis dalam digital economy merubah struktur ekonomi dunia dan menimbulkan eksternalitas bagi masyarakat.

Beberapa sektor implikasi eksternalitas digital economy yaitu; 1) kesehatan; 2) ritel dan distribusi; 3) desain dan manufaktur; 4) hubungan masyarakat; 5) pemerintah; 6) liburan, perjalanan dan pariwisata; 7)

pembelajaran dan pendidikan; 8) hiburan dan media. Alasan logis ini dapat diterima oleh masyarakat mengingat dampak eksternalitas dari digital economy sangat tinggi terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori digital economy sebagai grand theory dalam memaknai transformasi digital yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data *indepth interview* terhadap beberapa informan kunci (Rukin, 2019). Penelitian kualitatif hampir seluruhnya bersifat deskriptif dan menghindari analisis teoritis. Secara umum, penelitian ini membuat teori dan konsep menjadi eksplisit. Tanpa interpretasi atau teori analitis, para pembaca penelitian kualitatif dapat menggunakan gagasan mudah dalam keseharian mereka sendiri. Gagasan tersebut jarang memberikan pengetahuan umum.

Studi deskriptif menyajikan gambaran mengenai jenis orang atau aktivitas sosial dan berfokus pada pertanyaan “bagaimana” dan “siapa”. Menyelidiki persoalan baru atau menerangkan alasan terjadinya suatu hal kurang diperhatikan dibandingkan menjelaskan situasinya. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa informan kunci penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Kunci Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Gus Fandi Akhmad Yani	Bupati Gresik
2	H. Armuji	Wakil Walikota Surabaya
3	H. Charles Meikyansyah	Komisi XI DPR RI
4	Hj. Anik Maslachah	Wakil Ketua DPRD Jatim
5	Herlina Harsono	Komisi D DPRD Kota Surabaya
6	Basa Alim	Dewan Pengawas

	Tualeka	Kadin Pusat
7	Muhammad Lutfi	Ketua HIPMI Kota Surabaya 2019-2022

Sumber: Data diolah Penulis (2022)

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, *focus group discussion*, dokumentasi, dan observasi (Fadli, 2021). Lebih lanjut penentuan informan penelitian dilakukan dengan metode *snowball sampling* yang menjadikan informan kunci lebih utama dan berpotensi dikembangkan kepada informan lainnya.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan analisa data yang bersifat induktif yaitu upaya yang dilakukan peneliti untuk dapat memperoleh kesimpulan yang relevan melalui pemikiran dan abstraksi (Anggito & Setiawan, 2018).

PEMBAHASAN

Interpretasi Teori Perubahan Sosial Budaya

Berdasarkan karakteristik perubahan sosial yang terjadi pada transformasi digital economy mempengaruhi yaitu: a) pengaruh unsur kebudayaan material terhadap unsur immaterial, perubahan transformasi digital memengaruhi secara nyata unsur kebudayaan termasuk pada kebiasaan setiap individu dalam *cross-check* harga barang; b) Perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat, salah satu implikasi adanya perubahan adalah fungsi dari sebuah tempat perbelanjaan semakin berkurang, setiap orang dapat berbelanja hanya dari rumah; c) perubahan dalam hubungan sosial sebagai perubahan keseimbangan sosial, dalam konteks transformasi digital hubungan sosial antar individu menjadi lebih baik dan cepat seiring dengan ketercapaian informasi yang lebih cepat. Kita dapat melihat bahwa masyarakat telah mendapatkan informasi yang baik tentang suatu produk maupun informasi yang dibutuhkan lainnya; d) suatu perubahan yang diterima dikarenakan perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, ideologi, jumlah penduduk atau penemuan dalam masyarakat, hal ini berimplikasi bahwa

perubahan sosial digital economy telah memenuhi kriteria tersebut dan secara aktif keterlibatan individu dalam mekanisme pasar semakin tinggi. Ketika keterlibatan dalam mekanisme pasar tinggi, maka setiap produsen tidak dapat memainkan harga sesuai keinginannya karena pasar cenderung mengarah pada persaingan sempurna; e) perubahan pola kehidupan masyarakat, perubahan pola kehidupan masyarakat berdasarkan data empiris yang didapatkan memang telah terjadi yaitu pola konsumsi masyarakat meningkat karena akses untuk berbelanja menjadi lebih mudah dan sangat cepat. Bahkan di pagi hari, setiap orang dapat langsung berbelanja dengan mengetuk beberapa kali mobile aplikasi; f) perubahan nilai, sistem sosial dan perilaku kelompok masyarakat, pada konteks digital economy merupakan salah satu perubahan yang dapat dengan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tentu dengan mudah merubah pola struktur kelompok masyarakat menuju kearah yang lebih efisien.

Berdasarkan pemenuhan kriteria teori perubahan sosial budaya menunjukkan hasil interpretasi bahwa digital economy secara aktif merubah seluruh struktur budaya yang ada di dalam masyarakat. Percepatan perubahan yang terjadi mengacu pada kegunaan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Semakin efisien dan efektif suatu transformasi digital economy maka semakin cepat perubahan terjadi di struktur tatanan kelompok masyarakat.

Interpretasi Teori Eksternalitas

Berdasarkan teori eksternalitas yang dijelaskan dimuka, selanjutnya akan diinterpretasikan sebagai berikut: 1) Eksternalitas dapat diproduksi konsumen maupun produsen, berdasarkan asumsi pertama dapat dijelaskan bahwa digital economy merupakan salah satu hal yang dapat diciptakan oleh konsumen maupun produsen. Dengan demikian asumsi pertama dalam eksternalitas terjawab; 2) eksternalitas yang terjadi diluar mekanisme pasar, secara landasan filosofis eksternalitas yang diwujudkan oleh digital economy tidak hanya terjadi diluar mekanisme pasar, akan tetapi mendegradasi sistem-sistem yang berjalan sangat lambat. Mengacu pada teori perubahan

sosial sebelumnya menunjukkan bahwa eksternalitas yang terjadi mengubah cara masyarakat menjalankan ekonomi; 3) Terdapat *feedback* dalam aspek eksternalitas, *feedback* yang diterima dalam hal ini adalah secara langsung berdampak positif terhadap masyarakat sehingga secara kontinuitas dapat dilakukan sebagai salah satu pengganti sistem yang lebih lambat sebelumnya. Sistem ini mulai ditinggalkan utamanya karena tidak memiliki efisiensi, eksternalitas menjadi semakin tinggi ketika *shifting* yang terjadi lebih efisien; 4) Eksternalitas bersifat positif maupun negatif, di dalam sebuah eksternalitas tentu akan mengalami perubahan bersifat positif dan negatif. Eksternalitas positif adalah keterbukaan informasi dalam digital economy sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lebih baik. Lebih lanjut eksternalitas negative yang terjadi adalah perubahan perilaku negatif masyarakat terkait dengan keamanan siber; 5) Peristiwa bersifat independent, hal ini memiliki implikasi bahwa perubahan transformasi digital tidak terkait dengan kepentingan mayoritas masyarakat. Akan tetapi lebih bersifat adaptif, sehingga mereka yang turut serta dalam transformasi digital economy maka mereka yang akan mendapatkan akses informasi lebih baik. Sedangkan pihak-pihak yang tetap bersikukuh mempertahankan bisnisnya akan mulai terdegradasi melalui perangkat sistem digital economy yang baru; 6) Peristiwa dapat terjadi melalui kelembagaan ataupun individu, dewasa ini perubahan digital economy yang dilakukan oleh sebuah perusahaan *start up* dapat secara eksis menjalankan usahanya sebagai salah satu bentuk transformasi. Transformasi tersebut dapat diikuti oleh kegiatan individu yang merasa penting dalam melakukan transformasi digital economy, sehingga mereka meninggalkan sistem lama yang lebih rumit.

Berdasarkan analisa interpretasi yang dilakukan bahwa eksternalitas akan terus bermunculan kedepan sebagai salah satu kepastian dari transformasi digital economy. Mereka yang menolak transformasi maka mereka yang akan bersiap untuk kegagalan dalam mekanisme pasar.

Perubahan Sosial Di Indonesia

Masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar membeli dan menjual di dalam mekanisme pasar, akan tetapi wajib mengamati perkembangan dan perubahan pola ekonomi yang terjadi. Pasar tidak hanya mewadahi kegiatan ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi tujuan-tujuan lain. Pasar lebih tradisional dalam hal ini yang tidak menggunakan pola digital mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dipastikan berdasarkan komoditas yang diperdagangkan, jika komoditas kebutuhan pokok maka masih dapat bertahan dalam perubahan digital. Akan tetapi jika meruntut pada kebutuhan sekunder maupun tersier maka perubahan transformasi digital economy merupakan suatu hal kepastian yang harus dilakukan.

Dampak positif dari perubahan sosial utamanya adalah keterbukaan informasi mengenai segala hal, hari-hari ini jika kita amati orang tidak perlu lagi datang ke toko untuk sekedar mengecek harga. Beberapa lain juga akan berimplikasi sama, tergantung pada komoditas perdagangan macam apa yang dianalisis. Sementara itu dampak negatif dari transformasi digital economy adalah munculkan moral hazard yang buruk akibat transformasi digital yaitu:

SIMPULAN

Bagian akhir artikel ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa dalam transformasi digital ekonomi akan selalu dihindangi oleh eksternalitas, dan eksternalitas tersebut dapat bersifat negatif maupun positif. Stigma masyarakat dalam hal ini menjadi penting untuk dapat menghindari dampak negatif dari transformasi. Seringkali transformasi tidak dibarengi dengan legalitas perundangan yang jelas, sehingga legalitas di Indonesia terkesan lambat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial maupun ekonomi. Legalitas didasarkan pada peristiwa, akan tetapi ketika sebuah peristiwa sudah membesar dan merugikan banyak masyarakat barulah legalitas tersebut dibentuk. Akan selalu ada biaya yang harus dibayarkan untuk menukar lambatnya legalitas perundangan dibentuk.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada batasan penelitian yang menghadirkan

paradigma perubahan sosial, perilaku masyarakat dan legalitas perundangan. Besar harapan penelitian selanjutnya dapat menggunakan multidisiplin lain untuk dapat menjelaskan fenomena perubahan social transformasi digital economy.

REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Borghard, E. D., & Lonergan, S. W. (2017). The logic of coercion in cyberspace. *Security Studies*, 26(3), 452–481.
- Buchanan, B. (2016). The life cycles of cyber threats. *Survival*, 58(1), 39–58.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- da Silva Neto, V. J., & Chiarini, T. (2021). Technological progress and political systems: Non-institutional digital platforms and political transformation. *Technology in Society*, 64, 101460.
- Dagnino, E. (2018). Culture, citizenship, and democracy: Changing discourses and practices of the Latin American left. In *Cultures of Politics Politics of Cultures* (pp. 33–63). Routledge.
- Doughty, H. A. (2014). Don Tapscott The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence New York, N.Y.: McGraw-Hill, 2014. *The Public Sector Innovation Journal*, 19(3), 1–6.
- Duke, J. M., & Sassoon, D. M. (2017). A classroom game on a negative externality correcting tax: Revenue return, regressivity, and the double dividend. *Journal of Economic Education*, 48(2), 65–73. <https://doi.org/10.1080/00220485.2017.1285736>
- E-Conomy. (2020). *E-Conomy Sea Report*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fischerkeller, M. P., & Harknett, R. J. (2017). Deterrence is not a credible strategy for cyberspace. *Orbis*, 61(3), 381–393.
- Garfinkel, B., & Dafoe, A. (2019). How does the offense-defense balance scale? *Journal of Strategic Studies*, 42(6), 736–763.
- Gartzke, E., & Lindsay, J. R. (2016). Coercion through cyberspace: The stability-instability paradox revisited. *The Power to Hurt: Coercion in International Politics*, 179–203.
- Libicki, M. C. (2009). *Cyberdeterrence and cyberwar*. RAND corporation.
- Lin, H. (2012). Escalation dynamics and conflict termination in cyberspace. *Strategic Studies Quarterly*, 6(3), 46–70.
- Nye Jr, J. S. (2016). Deterrence and dissuasion in cyberspace. *International Security*, 41(3), 44–71.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Saputra, D. H., Sutiksno, D. U., Kusuma, A. H. P., Romindo, R., Wahyuni, D., Purnomo, A., & Simarmata, J. (2020). *Digital Marketing: Komunikasi Bisnis Menjadi Lebih Mudah*. Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, I., & Zulkarnain. (2022). The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2(1), 09–16. <https://doi.org/10.32996/bjahs.2022.2.1.2>
- Tello-Gamarra, J., & Netto, C. (2022). The sharing economy in social media: An institutional analysis in an emerging country. *Managerial and Decision Economics*, 43(4), 988–999. <https://doi.org/10.1002/mde.3433>

- Tomczyk, M. S. (2021). Domino Effect: How Pandemic Chain Reactions Disrupted Companies and Industries. In *Digital Transformation in a Post-COVID World* (pp. 33–48). CRC Press.
- Ulas, D. (2019). Digital Transformation Process and SMEs. *Procedia Computer Science*, 158, 662–671. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.101>
- Valeriano, B., Jensen, B. M., & Maness, R. C. (2018). *Cyber strategy: The evolving character of power and coercion*. Oxford University Press.
- Watanabe, C., Akhtar, W., Tou, Y., & Neittaanmäki, P. (2021). Amazon's initiative transforming a non-contact society-Digital disruption leads the way to stakeholder capitalization. *Technology in Society*, 65, 101596.
- Wirryasa, N. M. A., & Dwijendra, N. K. A. (2021). Socio-physical transformation towards sustainable urban morphology through land readjustment in Indonesia. *Civil Engineering and Architecture*, 9(3), 874–882. <https://doi.org/10.13189/CEA.2021.090329>
- Yoo, I., & Yi, C. G. (2022). Economic Innovation Caused by Digital Transformation and Impact on Social Systems. *Sustainability (Switzerland)*, 14(5), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su14052600>
- Zwilling, M., Klien, G., Lesjak, D., Wiechetek, Ł., Cetin, F., & Basim, H. N. (2022). Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study. *Journal of Computer Information Systems*, 62(1), 82–97. <https://doi.org/10.1080/08874417.2020.1712269>